

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ariyanto, Y. (2020). *Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman, L. M. (2014). *Legal Culture and Legal Change: The Case of the American Jury*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harjono. (2015). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press.

Hartono, M. (2018). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hartono, S. (2018). *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasibuan, F. (2020). *Keadilan Progresif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Lalamentik, E. E. (2018). *Peninjauan Kembali oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Lestari, D. (2020). *Pengawasan Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Lestari, R. (2020). *Keadilan Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Muladi. (2013). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Munir, M. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

Nawawi, B. (2015). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Peninjauan Kembali*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Nurhadi, B. (2020). *Peran Jaksa dalam Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, T. (2019). *Praktik Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, W. (2017). *Peradilan Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Quraish Shihab, M. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Santosa, B., & Sujadi. (2020). *Peninjauan Kembali dalam Proses Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, E. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Penegakannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, T. (2021). *Hukum Pidana dan Proses Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2015). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suryadi, T. (2020). *Kekosongan Norma dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahyu, R. (2019). *Prinsip Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliana, R., & Pratama, D. (2021). *Upaya Terakhir Menggapai Keadilan*. Bandung: Alumni.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Kasasi Nomor 534 K/PID/2020*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Kasasi Nomor 1466 K/PID/2024*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023*.

Pengadilan Negeri Gianyar Bali. (2019). *Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin*.

Pengadilan Tinggi Denpasar. (2019). *Putusan Nomor 78/PID/2019/PT.DPS*.

C. SUMBER LAIN

Auliya, I. H., Amiruddin, & Pancaningrum, R. K. (2023). Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(1), 23–39.

- Damayanti, F. I., & Soeskandi, H. (2022). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Bureaucracy Journal*, 2(2), 45–60.
- Fauzi, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali oleh Jaksa. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 112–128.
- Hafid, R. (2021). Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 55–67.
- Hasanah, S. (2022). Tinjauan Yuridis Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 88–102.
- Iskandar, R. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 225–240.
- Junaidi, A. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Jaksa dalam Peninjauan Kembali. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 77–95.
- Kurniawan, A. (2021). Kewenangan Jaksa dalam Peninjauan Kembali Putusan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 133–148.
- Mahendra, D. (2022). Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan Substantif. *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, 9(1), 19–34.
- Marzuki, P. M. (2020). Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(3), 56–72.
- Nugraha, F. (2022). Kewenangan Jaksa Mengajukan PK dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Jurnal Yustisia*, 8(2), 201–217.
- Pratama, D. (2021). Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 10(4), 311–327.
- Putra, A. (2023). Analisis Yuridis Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 21(1), 66–82.
- Rachman, F. (2022). Peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Peninjauan Kembali. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 13(2), 145–160.
- Rahmawati, L. (2021). Hak Konstitusional Terdakwa dalam Peninjauan Kembali. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 77–92.

- Ramdhan, Y. (2023). Peninjauan Kembali dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 19(2), 95–111.
- Saputra, B. (2022). Diskursus Teori Keadilan dalam Peninjauan Kembali. *Jurnal Teori Hukum*, 5(3), 222–238.
- Siregar, H. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Jaksa. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 7(2), 199–215.
- Suhardi, A. (2021). Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum HAM*, 4(1), 40–56.
- Wijaya, A. (2023). Reformulasi Peninjauan Kembali dalam KUHAP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 55–70.
- Yusuf, I. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam PK Pidana. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 188–203.